

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Kabupaten Agam Menggunakan Pendekatan Value For Money

Ullycia Nezy Azwita¹, Asep Ajidin²

Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Indonesia

ullycianaazwita@gmail.com¹, asepajidinhamidy@gmail.com²

Kata Kunci:

Value for Money, Kinerja Anggaran, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas.

Abstrak

Tingginya realisasi anggaran belum tentu mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang optimal karena penggunaan sumber daya publik juga perlu dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan output dan mencapai target kinerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kinerja anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2025 menggunakan pendekatan *Value for Money* berdasarkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen anggaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUTR tergolong ekonomis dengan rasio 88,64%, tetapi empat sasaran yang dianalisis belum efisien dan efektivitasnya masih belum optimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tergolong cukup ekonomis dengan rasio 98,70%, dengan tiga kegiatan efisien dan empat cukup efisien serta sejumlah indikator efektif dan sangat efektif. Dinas Pertanian tergolong ekonomis dengan rasio 88,79%, seluruh program dan kegiatan yang dianalisis termasuk efisien, serta sebagian besar indikator berada pada kategori efektif atau sangat efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan kinerja anggaran. Penilaian kinerja pemerintah daerah perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara bersamaan agar penggunaan sumber daya publik lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Keyword:

Value for Money, Budget Performance, Economy, Efficiency, Effectiveness.

Abstract

A high level of budget realization does not necessarily reflect optimal budget management performance, as the use of public resources should also be assessed based on their ability to generate outputs and achieve performance targets. This study aims to analyze and compare the budget performance of the Public Works and Spatial Planning Office (PUTR), the Education and Culture Office, and the Agriculture Office of Agam Regency in 2025 using the *Value for Money* approach based on economy, efficiency, and effectiveness. This study employed a quantitative descriptive approach using secondary data obtained from budget documents, Budget Realization Reports (LRA), and Government Agency Performance Reports (LKjIP) for 2025. The results show that the PUTR Office was categorized as economical, with a ratio of 88.64%; however, the four analyzed targets were inefficient, and its effectiveness remained suboptimal. The Education and Culture Office was categorized as fairly economical, with a ratio of 98.70%; three activities were efficient and four were fairly efficient, while several performance indicators were classified as effective and highly effective. The Agriculture Office was categorized as economical, with a ratio of 88.79%; all analyzed programs and activities were classified as efficient, and most performance indicators were categorized as effective or highly effective. This study concludes that the budget absorption rate cannot be used as the sole measure of successful budget performance. Local government performance should be assessed by simultaneously considering economy, efficiency, and effectiveness to ensure more accountable and results-oriented use of public resources.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, pemerataan hasil pembangunan, penguatan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan. Todaro dan Smith (2024) memandang pembangunan sebagai proses multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas kehidupan dan perluasan kesempatan masyarakat. Sejalan dengan itu, Stiglitz et al. (2018) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan perlu memperhatikan kesejahteraan, distribusi pendapatan, ketimpangan, kualitas hidup, dan keberlanjutan. Perspektif pembangunan manusia juga menempatkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak sebagai dimensi penting dalam pencapaian kesejahteraan (United Nations Development Programme, 2020).

Dalam pembangunan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya publik dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran dan tingkat realisasinya, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai dengan sasaran pembangunan. Azzahro et al. (2025) menunjukkan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sedangkan Imantria dan Kurnia (2024) menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah pada berbagai sektor dapat berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan belanja daerah memiliki peran dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi belum tentu menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara optimal. Anggaran yang terealisasi tetap perlu dievaluasi berdasarkan hubungan antara sumber daya yang digunakan, *output* yang dihasilkan, dan sasaran program yang dicapai. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persoalan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas masih ditemukan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Suridiyanti et al. (2024) menemukan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka tergolong ekonomis dan efektif, tetapi belum efisien. Prasestia et al. (2024) memperoleh hasil bahwa aspek ekonomi dan efektivitas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami peningkatan, sedangkan efisiensi masih perlu diperbaiki. Harahap (2024) juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Barat secara umum cukup baik, tetapi beberapa daerah belum mencapai efisiensi.

Temuan penelitian lainnya menunjukkan kondisi yang beragam. Triyassari dan Sambharakreshna (2024) menemukan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk cukup ekonomis, cukup efisien, dan sangat efektif. Zahra dan Ismanto (2025) menunjukkan pentingnya pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam menilai kinerja anggaran, sedangkan Prayoga dan Nirmalasari (2025) menemukan bahwa aspek ekonomi dan efisiensi pada program perekonomian dan pembangunan masih belum maksimal. Hariatih et al. (2026) juga menemukan adanya *hidden inefficiency*, khususnya pada belanja modal pemerintah daerah. Sementara itu, Usman et al. (2025) dan Said et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan *Value for Money* dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Permasalahan efisiensi pengeluaran publik juga ditemukan pada konteks internasional. Amusa dan Fadiran (2024) menemukan adanya perbedaan tingkat efisiensi pengeluaran publik antar pemerintah municipal di Afrika Selatan, sedangkan Lino et al. (2025) menunjukkan adanya variasi tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah municipal di Peru. Finocchiaro Castro et al. (2025) menemukan bahwa kualitas kelembagaan memiliki hubungan dengan efisiensi pemerintah daerah di Italia. Dalam konteks Indonesia, Sugiyarto et al. (2025) menemukan adanya perbedaan kinerja pengeluaran publik antar daerah tertinggal dan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak selalu diikuti peningkatan kinerja secara proporsional. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa besarnya pengeluaran dan tingginya realisasi anggaran tidak selalu mencerminkan kualitas kinerja pengelolaan anggaran.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi tersebut adalah *Value for Money*, yang menilai pengelolaan sumber daya publik berdasarkan prinsip ekonomi (*economy*), efisiensi (*efficiency*), dan efektivitas (*effectiveness*). Ekonomi berkaitan dengan penggunaan input secara hemat, efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output, sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran program. Menurut Usman et al. (2025), *Value for Money* dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan ketiga aspek tersebut. Shiva et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya publik dengan mempertimbangkan biaya, sumber daya, dan manfaat yang dihasilkan.

penelitian mengenai *Value for Money* telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pemerintah daerah secara keseluruhan atau pada satu organisasi pemerintah. Penelitian yang membandingkan kinerja anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan karakteristik fungsi berbeda dalam satu pemerintah daerah masih relatif terbatas. Padahal, setiap OPD memiliki tugas, jenis program, struktur belanja, dan target kinerja yang berbeda sehingga memungkinkan adanya variasi dalam tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut menjadi *research gap* penelitian ini.

Fenomena tersebut terlihat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025. Ketiga OPD tersebut memiliki karakteristik fungsi yang berbeda, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan pertanian. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, tingkat realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 99,44%, Dinas Pertanian 88,79%, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 88,64%. Variasi yang lebih

besar terlihat pada jenis belanja tertentu. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, realisasi belanja modal jembatan hanya mencapai 4,97%, sedangkan pada Dinas Pertanian realisasi belanja modal sebesar 39,97%. Sebaliknya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan realisasi yang relatif tinggi pada belanja operasi sebesar 99,52% dan belanja modal sebesar 95,99%. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tingkat realisasi anggaran antar-OPD maupun antarjenis belanja masih bervariasi sehingga penilaian berdasarkan persentase penyerapan anggaran saja belum cukup untuk menggambarkan kualitas pengelolaan anggaran.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja penggunaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 menggunakan pendekatan *Value for Money*. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan anggaran pada OPD dengan karakteristik fungsi pembangunan yang berbeda serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Deskriptif Kuantitatif Untuk Menganalisis Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan Pendekatan *Value For Money*. Menurut Sugiyono (2023), Penelitian Kuantitatif Merupakan Metode Penelitian Yang Berlandaskan Pada Filsafat Positivisme Dan Menggunakan Data Berbentuk Angka Serta Analisis Statistik, Sedangkan Pendekatan Deskriptif Digunakan Untuk Menggambarkan Suatu Keadaan Atau Fenomena Berdasarkan Data Yang Diperoleh. Penelitian Dilaksanakan Pada Tahun 2026 Dengan Menggunakan Data Tahun Anggaran 2025 Pada Tiga Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kabupaten Agam, Yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Serta Dinas Pertanian. Ketiga Opd Dipilih Karena Memiliki Karakteristik Fungsi Pembangunan Yang Berbeda, Masing-Masing Pada Bidang Infrastruktur, Pendidikan, Dan Pertanian.

Data Yang Digunakan Merupakan Data Sekunder Yang Diperoleh Melalui Teknik Dokumentasi Dari Dokumen Resmi Pemerintah Kabupaten Agam Dan Masing-Masing Opd. Menurut Sugiyono (2023), Data Sekunder Merupakan Data Yang Diperoleh Peneliti Secara Tidak Langsung Melalui Dokumen Atau Sumber Yang Telah Tersedia. Data Penelitian Meliputi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Dpa), Laporan Realisasi Anggaran (Lra), Laporan Kinerja Opd, Serta Dokumen Perencanaan Yang Memuat Target Dan Realisasi Capaian Program/Kegiatan. Pengumpulan Data Juga Didukung Dengan Studi Kepustakaan Melalui Buku, Artikel Ilmiah, Peraturan, Dan Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Kinerja Anggaran Dan *Value For Money*.

Teknik Analisis Data Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Yang Mencakup Tiga Aspek, Yaitu Ekonomi, Efisiensi, Dan Efektivitas. Menurut Mardiasmo (2020), *Value For Money* Merupakan Konsep Pengelolaan Organisasi Sektor Publik Yang Didasarkan Pada Prinsip Ekonomi, Efisiensi, Dan Efektivitas. Aspek Ekonomi Dianalisis Dengan Membandingkan Realisasi Belanja Dengan Anggaran Belanja. Rasio Ekonomi Dihitung Menggunakan Rumus:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Dikategorikan Ekonomis Apabila Rasio <90%, Cukup Ekonomis Apabila 90–100%, Dan Tidak Ekonomis Apabila >100%. Semakin Rendah Realisasi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan Anggaran Yang Ditetapkan, Semakin Ekonomis Penggunaan Anggaran, Dengan Tetap Mempertimbangkan Pencapaian Target Program.

Efisiensi Mengukur Kemampuan Opd Menghasilkan *Output* Dengan Penggunaan Sumber Daya Secara Optimal. Pengukuran Dilakukan Dengan Melihat Hubungan Antara Input Berupa Penggunaan Anggaran Dengan *Output* Yang Dihasilkan Dari Program Atau Kegiatan. Karena Karakteristik Dan Satuan *Output* Masing-Masing Opd Berbeda, Indikator *Output* Mengacu Pada Indikator Kinerja Yang Tercantum Dalam Dokumen Resmi Masing-Masing Opd. Hasil Pengukuran Dikategorikan Efisien Apabila Rasio <90%, Cukup Efisien Apabila 90–100%, Dan Tidak Efisien Apabila >100%.

Efektivitas Digunakan Untuk Mengukur Tingkat Pencapaian Target Program Dengan Membandingkan Realisasi Capaian Dengan Target Yang Telah Ditetapkan. Rasio Efektivitas Dihitung Menggunakan Rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Input yang Digunakan}}{\text{Output yang Dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Dikategorikan Sangat Efektif Apabila >100%, Efektif Apabila 90–100%, Cukup Efektif Apabila 80–89%, Kurang Efektif Apabila 60–79%, Dan Tidak Efektif Apabila <60%. Selanjutnya, Hasil Pengukuran Ekonomi, Efisiensi, Dan Efektivitas Pada Masing-Masing Opd Dianalisis Secara Deskriptif Dan Dibandingkan Untuk Memperoleh Gambaran Mengenai Kinerja Penggunaan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis *Value for Money* menunjukkan adanya perbedaan kinerja anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2025. Perbedaan tersebut terlihat pada tiga aspek yang dianalisis, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Rasio ekonomi dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam memiliki anggaran sebesar Rp49.911.098.751,82 dengan realisasi Rp44.243.324.037,00. Dengan demikian, rasio ekonominya adalah:

$$\text{Rasio Ekonomi} = (\text{Rp}44.243.324.037,00 / \text{Rp}49.911.098.751,82) \times 100\% = 88,64\%$$

Nilai 88,64% berada di bawah 90%, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang termasuk kategori ekonomis. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp5.667.774.714,82 atau sekitar 11,36% dari anggaran yang tersedia. Meskipun demikian, kondisi ekonomis tersebut belum dapat langsung dinilai sebagai kinerja yang optimal karena masih terdapat variasi realisasi antarjenis belanja, seperti belanja modal jalan sebesar 94,03%, sedangkan belanja modal jembatan hanya sebesar 4,97%.

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran Tahun 2025 sebesar Rp646.554.118.925,72 dengan realisasi sebesar Rp638.124.890.614,00. Perhitungan rasio ekonomi adalah:

$$\text{Rasio Ekonomi} = (\text{Rp}638.124.890.614,00 / \text{Rp}646.554.118.925,72) \times 100\% = 98,70\%$$

Rasio sebesar 98,70% berada pada interval 90%–100%, sehingga termasuk kategori cukup ekonomis. Selisih anggaran dengan realisasi sebesar Rp8.429.228.311,72. Tingginya tingkat penyerapan menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan untuk mendukung program pendidikan dan kebudayaan. Namun, masih terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi relatif rendah, sehingga penilaian ekonomi tetap perlu dikaitkan dengan pencapaian output dan target program.

Sementara itu, Dinas Pertanian memiliki anggaran sebesar Rp21.403.829.824,61 dengan realisasi sebesar Rp19.004.593.189,00. Rasio ekonomi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = (\text{Rp}19.004.593.189,00 / \text{Rp}21.403.829.824,61) \times 100\% = 88,79\%$$

Rasio sebesar 88,79% termasuk kategori ekonomis karena berada di bawah 90%. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp2.399.236.635,61. Tingkat realisasi yang relatif rendah juga terlihat pada beberapa komponen, seperti belanja pelatihan/bimbingan teknis sebesar 56,64%, belanja modal sebesar 39,97%, dan belanja sewa gedung/bangunan sebesar 16,16%. Namun, penghematan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kinerja optimal karena sejumlah indikator produksi belum mencapai target akibat faktor seperti kemarau panjang, banjir, tanah longsor, dan kesehatan hewan.

Secara perbandingan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki rasio ekonomi paling rendah sebesar 88,64%, diikuti Dinas Pertanian sebesar 88,79%, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 98,70%. Berdasarkan kriteria pengukuran, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pertanian termasuk kategori ekonomis, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk cukup ekonomis. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga OPD telah mampu mengendalikan penggunaan anggaran agar tidak melebihi pagu yang ditetapkan, meskipun tingkat penghematan yang dicapai berbeda. Penilaian tersebut tetap perlu dikaitkan dengan aspek efisiensi dan efektivitas agar dapat menggambarkan kualitas pengelolaan anggaran secara lebih menyeluruh.

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam. Dalam penelitian ini, realisasi anggaran digunakan sebagai *input*, sedangkan capaian kinerja program, kegiatan, atau sasaran digunakan sebagai *output*. Rasio efisiensi dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Realisasi Anggaran (\%)} / \text{Capaian Kinerja (\%)})) \times 100\%$$

Tabel 1. Hasil Analisis Efisiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2025

OPD	Program/Sasaran/Kegiatan	Output (%)	Input (%)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
PUTR	Jaringan irigasi kondisi baik	51,74	93,30	180,32	Tidak Efisien
PUTR	Kemantapan jalan kabupaten	68,98	80,75	117,06	Tidak Efisien
PUTR	Layanan pengolahan air limbah domestik	79,57	98,43	123,70	Tidak Efisien
PUTR	Kinerja tata ruang	79,50	88,56	111,40	Tidak Efisien
Pendidikan dan Kebudayaan	Sarana, prasarana, dan utilitas SD	100,00	99,50	99,50	Cukup Efisien
Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan mebel SD	100,00	99,62	99,62	Cukup Efisien
Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan SD	100,00	80,56	80,56	Efisien
Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMP	100,00	66,48	66,48	Efisien
Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Dana BOS SMP	100,00	96,65	96,65	Cukup Efisien
Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	100,00	90,57	90,57	Cukup Efisien
Pendidikan dan Kebudayaan	Perlengkapan peserta didik PAUD	100,00	83,06	83,06	Efisien
Pertanian	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	103,00	48,76	47,34	Efisien
Pertanian	Pengembangan prasarana pertanian	153,00	17,79	11,63	Efisien
Pertanian	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	108,00	84,90	78,61	Efisien
Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	114,00	85,57	75,06	Efisien
Pertanian	Penyuluhan pertanian	535,00	79,22	14,81	Efisien

Sumber: LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2025, diolah peneliti.

Berdasarkan Tabel 1, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menunjukkan tingkat efisiensi yang belum optimal karena seluruh sasaran yang dianalisis memiliki rasio efisiensi di atas 100%, yaitu berkisar antara 111,40%–180,32%. Rasio tertinggi terdapat pada sasaran jaringan irigasi kondisi baik sebesar 180,32%. Sasaran tersebut memiliki target kinerja 51,20% dan realisasi 26,49%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 51,74%. Sementara itu, dari anggaran Rp2.379.591.850 terealisasi Rp2.220.195.498 atau 93,30%. Dengan demikian, rasio efisiensinya sebesar $(93,30\% / 51,74\%) \times 100\% = 180,32\%$. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang relatif tinggi belum diikuti dengan pencapaian output yang sebanding.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif lebih baik. Seluruh tujuh kegiatan yang dianalisis mencapai output 100%, sedangkan realisasi anggarannya berada pada kisaran 66,48%–99,62%. Tiga kegiatan termasuk kategori efisien, yaitu pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan SD sebesar 80,56%, pembinaan kelembagaan dan manajemen SMP sebesar 66,48%, serta pengadaan perlengkapan peserta didik PAUD sebesar 83,06%. Empat kegiatan lainnya termasuk cukup efisien, dengan rasio antara 90,57%–99,62%. Sebagai contoh, kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen SMP berhasil merealisasikan seluruh target sebanyak 68 satuan pendidikan dengan anggaran Rp27.199.900 dari Rp40.913.000 atau 66,48%. Dengan output 100%, diperoleh rasio efisiensi sebesar $(66,48\% / 100\%) \times 100\% = 66,48\%$, sehingga termasuk kategori efisien.

Dinas Pertanian menunjukkan tingkat efisiensi paling baik karena seluruh lima program dan kegiatan yang dianalisis berada pada kategori efisien, dengan rasio 11,63%–78,61%. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, misalnya, memiliki anggaran Rp2.140.226.254 dengan realisasi Rp1.043.592.201 atau 48,76%, sementara capaian kinerjanya mencapai 103%. Dengan demikian, diperoleh rasio efisiensi sebesar $(48,76\% / 103\%) \times 100\% = 47,34\%$. Rasio terendah terdapat pada Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar 11,63%, dengan capaian kinerja 153% dan realisasi anggaran 17,79%. Program Penyuluhan Pertanian juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 535% dengan realisasi anggaran 79,22%, sehingga menghasilkan rasio efisiensi sebesar 14,81%.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan tingkat efisiensi antarketiga OPD. Dinas PUTR belum menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien karena seluruh sasaran yang dianalisis memiliki rasio di atas 100%. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan tiga kegiatan efisien dan empat kegiatan cukup efisien, sedangkan Dinas Pertanian menunjukkan tingkat efisiensi terbaik karena seluruh program dan kegiatan yang dianalisis memiliki rasio di bawah 90%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran efisiensi, tetapi perlu dibandingkan dengan output yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut.

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan masing-masing OPD dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran menggunakan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi capaian kinerja terhadap target, menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = (\text{Realisasi Capaian} / \text{Target Capaian}) \times 100\%$$

Hasil pengukuran efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Efektivitas Tiga OPD Kabupaten Agam Tahun 2025

OPD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
PUTR	Akses air minum layak	92,00%	81,42%	88,51	Cukup Efektif
	Jaringan irigasi kondisi baik	51,20%	26,49%	51,74	Tidak Efektif
	Kemantapan jalan kabupaten	86,00%	59,32%	68,98	Kurang Efektif
	Layanan pengolahan air limbah domestik	80,50%	64,05%	79,57	Kurang Efektif
	Kinerja tata ruang	83,00%	65,98%	79,50	Kurang Efektif
Pendidikan dan Kebudayaan	APK PAUD	83,75%	56,28%	67,20	Kurang Efektif

	Lembaga PAUD terakreditasi	60,40%	93,81%	155,31	Sangat Efektif
	SMP terakreditasi minimal B	84,81%	88,24%	104,04	Sangat Efektif
	Pelayanan sesuai SPM Pendidikan Dasar	100%	100%	100,00	Efektif
	Pelayanan sesuai SPM Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100,00	Efektif
	Pelayanan sesuai SPM PAUD	100%	100%	100,00	Efektif
	Murid SD mampu berbahasa Inggris	30%	13%	43,33	Tidak Efektif
	Murid SMP mampu berbahasa Inggris	35%	20%	57,14	Tidak Efektif
	Lembaga adat menerapkan tradisi dan budaya	79,29%	100%	126,12	Sangat Efektif
	Rumah tangga menyelenggarakan upacara adat	40%	85%	212,50	Sangat Efektif
	Warisan Budaya Tak Benda yang terdata	75	40	53,33	Tidak Efektif
	Pengunjung museum	20.500 orang	33.140 orang	161,65	Sangat Efektif
Pertanian	Produksi padi	270.363 ton	266.041,7 ton	98,40	Efektif
	Produksi jagung	91.740,99 ton	91.714,5 ton	99,97	Efektif
	Produksi cabai merah	36.041 ton	28.796 ton	79,90	Kurang Efektif
	Produksi bawang merah	5.134 ton	3.814 ton	74,29	Kurang Efektif
	Produksi manggis	4.625 ton	8.016 ton	173,32	Sangat Efektif
	Produksi jeruk	7.420 ton	5.655 ton	76,21	Kurang Efektif
	Produksi kopi	1.700 ton	1.664,8 ton	97,93	Efektif
	Produksi tebu	3.010 ton	2.967 ton	98,57	Efektif
	Produksi kulit manis	31.695 ton	31.147 ton	98,27	Efektif
	Produksi kelapa	11.518 ton	11.429 ton	99,23	Efektif
	Produksi sapi	1.737 ton	1.579,34 ton	90,92	Efektif
	Produksi kerbau	34 ton	28,09 ton	82,62	Cukup Efektif
	Produksi kambing	110 ton	56,4 ton	51,27	Tidak Efektif
	Produksi unggas	19.499 ton	20.192,3 ton	103,56	Sangat Efektif
	Kelompok tani yang dibina	77 kelompok	80 kelompok	103,90	Sangat Efektif
	Nilai SAKIP	73	79,68	109,15	Sangat Efektif

Sumber: LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2025, diolah peneliti.

Berdasarkan Tabel 2, efektivitas Dinas PUTR masih belum optimal. Dari lima indikator yang dianalisis, tidak terdapat indikator yang mencapai kategori efektif atau sangat efektif. Satu indikator termasuk cukup efektif, yaitu akses air minum layak sebesar 88,51%; tiga indikator kurang efektif, yaitu kemantapan jalan kabupaten 68,98%, layanan pengolahan air limbah domestik 79,57%, dan kinerja tata ruang 79,50%; sedangkan jaringan irigasi kondisi baik hanya mencapai 51,74% dan termasuk tidak efektif. Sebagai contoh, indikator jaringan irigasi memiliki target 51,20% dan realisasi 26,49%, sehingga diperoleh rasio $(26,49\% / 51,20\%) \times 100\% = 51,74\%$. Hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi pada sebagian besar indikator pembangunan infrastruktur.

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tingkat efektivitas menunjukkan hasil yang lebih beragam. Dari 12 indikator yang dianalisis, lima indikator termasuk sangat efektif, yaitu lembaga PAUD terakreditasi 155,31%, SMP terakreditasi minimal B 104,04%, lembaga adat yang menerapkan tradisi dan budaya 126,12%, rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat 212,50%, dan jumlah pengunjung museum 161,65%. Tiga indikator pelayanan sesuai SPM mencapai 100% dan termasuk efektif. Sementara itu, APK PAUD hanya mencapai 67,20%, sedangkan kemampuan berbahasa Inggris murid SD 43,33%, murid SMP 57,14%, dan pendataan Warisan Budaya Tak Benda 53,33%, sehingga masih memerlukan peningkatan. Rasio tertinggi terdapat pada penyelenggaraan upacara adat, dengan target 40% dan realisasi 85%, sehingga diperoleh rasio $(85\% / 40\%) \times 100\% = 212,50\%$.

Efektivitas Dinas Pertanian relatif lebih baik. Dari 16 indikator, empat termasuk sangat efektif, yaitu produksi manggis 173,32%, produksi unggas 103,56%, peningkatan jumlah kelompok tani yang dibina 103,90%, dan nilai SAKIP 109,15%. Tujuh indikator termasuk efektif, yaitu produksi padi 98,40%, jagung 99,97%, kopi 97,93%, tebu 98,57%, kulit manis 98,27%, kelapa 99,23%, dan sapi 90,92%. Produksi kerbau sebesar 82,62% termasuk cukup efektif, sedangkan cabai merah 79,90%, bawang merah 74,29%, dan jeruk 76,21% termasuk kurang efektif. Produksi kambing menjadi indikator terendah, yaitu hanya 51,27%, dari target 110 ton dan realisasi 56,4 ton. Sebaliknya, produksi manggis menjadi indikator tertinggi karena realisasi 8.016 ton jauh melampaui target 4.625 ton, sehingga menghasilkan rasio $(8.016 / 4.625) \times 100\% = 173,32\%$.

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan adanya perbedaan efektivitas antartiga OPD. Dinas PUTR memiliki efektivitas yang relatif paling rendah karena belum terdapat indikator yang mencapai kategori efektif. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan efektivitas yang baik tetapi belum merata, terutama karena masih rendahnya capaian APK PAUD, kemampuan bahasa Inggris peserta didik, dan pendataan Warisan Budaya Tak Benda. Sementara itu, Dinas Pertanian menunjukkan efektivitas yang relatif lebih baik, dengan 11 dari 16 indikator berada pada kategori efektif atau sangat efektif, meskipun beberapa komoditas masih belum mencapai target. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya realisasi anggaran, tetapi terutama oleh kemampuan OPD mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Tahun 2025 Berdasarkan Value for Money

Berdasarkan ketiga aspek *Value for Money*, kinerja anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya optimal. Pada aspek ekonomi, rasio sebesar 88,64% termasuk kategori ekonomis karena realisasi anggaran berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Namun, kondisi tersebut belum diikuti efisiensi dan efektivitas yang optimal. Beberapa sasaran memiliki rasio efisiensi di atas 100% sehingga termasuk tidak efisien, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran relatif lebih tinggi dibandingkan capaian output. Selain itu, beberapa indikator strategis juga belum mencapai target yang ditetapkan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penghematan anggaran tidak secara langsung mencerminkan keberhasilan pengelolaan anggaran. Suatu OPD dapat tergolong ekonomis, tetapi belum tentu efisien dan efektif apabila penggunaan input tidak menghasilkan output yang sebanding dan target kinerja belum tercapai. Hasil ini sejalan dengan Suridiyanti et al. (2024) yang menemukan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka tergolong ekonomis dan efektif, tetapi belum efisien. Prasetya et al. (2024) juga menunjukkan bahwa peningkatan aspek ekonomi dan efektivitas belum selalu diikuti tingkat efisiensi yang optimal.

Temuan penelitian ini juga didukung Harahap (2024) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Barat secara umum cukup baik, tetapi masih terdapat daerah yang belum mencapai efisiensi secara optimal. Selain itu, Hariatih et al. (2026) menemukan adanya *hidden inefficiency*, terutama pada belanja modal. Temuan tersebut relevan dengan karakteristik Dinas PUTR yang banyak

melaksanakan pembangunan fisik dan infrastruktur, sehingga penggunaan anggaran perlu diikuti pencapaian output fisik yang sesuai dengan target.

Dengan demikian, Dinas PUTR perlu memperkuat keterkaitan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian target fisik. Peningkatan kinerja tidak cukup berorientasi pada penyerapan atau penghematan anggaran, tetapi juga pada kemampuan sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan output dan mencapai sasaran pembangunan secara optimal.

Kinerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Tahun 2025 Berdasarkan Value for Money

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Tahun 2025 memiliki rasio ekonomi sebesar 98,70% dan termasuk kategori cukup ekonomis, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan untuk pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan. Dari aspek efisiensi, sejumlah kegiatan mampu mencapai output 100% dengan realisasi anggaran di bawah 100%, seperti pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan SD sebesar 80,56%, pembinaan kelembagaan dan manajemen SMP sebesar 66,48%, serta pengadaan perlengkapan peserta didik PAUD sebesar 83,06%.

Dari aspek efektivitas, beberapa indikator mampu mencapai bahkan melampaui target, antara lain lembaga PAUD terakreditasi sebesar 155,31%, SMP terakreditasi minimal B sebesar 104,04%, lembaga adat yang menerapkan tradisi dan budaya sebesar 126,12%, serta jumlah pengunjung museum sebesar 161,65%. Meskipun demikian, pencapaian belum merata karena masih terdapat indikator yang rendah, terutama APK PAUD, kemampuan bahasa Inggris peserta didik, dan pendataan Warisan Budaya Tak Benda. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya penggunaan anggaran dapat menghasilkan output dan capaian yang baik, tetapi evaluasi tetap diperlukan pada tingkat kegiatan dan indikator.

Temuan ini sejalan dengan Triyassari dan Sambharakreshna (2024) yang menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada pada kondisi cukup ekonomis, cukup efisien, dan sangat efektif. Hasil ini juga relevan dengan Usman et al. (2025) yang menegaskan bahwa *Value for Money* memberikan penilaian yang lebih menyeluruh melalui aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Shiva et al. (2024) juga menunjukkan bahwa *Value for Money* dapat digunakan untuk mengevaluasi pelayanan publik dengan mempertimbangkan sumber daya, biaya, dan manfaat yang dihasilkan. Selanjutnya, Said et al. (2025) menemukan bahwa penerapan *Value for Money* berkaitan dengan kinerja anggaran serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan anggaran pemerintah.

Dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mempertahankan kegiatan yang telah efisien dan indikator yang telah mencapai atau melampaui target, sekaligus memprioritaskan perbaikan pada indikator yang masih rendah, terutama partisipasi PAUD, kompetensi peserta didik, serta pendataan dan pelestarian kebudayaan.

Kineja Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2025 Berdasarkan Value for Money

Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2025 memiliki rasio ekonomi sebesar 88,79% dan termasuk kategori ekonomis, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Dari aspek efisiensi, seluruh program dan kegiatan yang dianalisis termasuk kategori efisien, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar 47,34%, Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian 11,63%, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 78,61%, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 75,06%, serta Program Penyuluhan Pertanian 14,81%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian output relatif tinggi dibandingkan dengan input anggaran yang digunakan.

Dari aspek efektivitas, pencapaian antarindikator masih bervariasi. Produksi manggis mencapai 173,32%, produksi unggas 103,56%, jumlah kelompok tani yang dibina 103,90%, dan nilai SAKIP 109,15%, sehingga termasuk sangat efektif. Sebaliknya, produksi cabai merah, bawang merah, dan jeruk termasuk kurang efektif, sedangkan produksi kambing hanya mencapai 51,27% dan termasuk tidak efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi pada tingkat program tidak selalu diikuti efektivitas yang sama pada setiap indikator karena pencapaian outcome juga dapat dipengaruhi faktor teknis dan eksternal.

Temuan ini sejalan dengan Sugiyarto et al. (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja secara proporsional. Hasil ini juga relevan dengan Lino et al. (2025) yang menemukan adanya perbedaan tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah dan pentingnya kemampuan pengelolaan sumber daya fiskal. Finocchiaro Castro et al. (2025) menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan berhubungan dengan efisiensi pemerintah daerah, sedangkan Amusa dan Fadiran (2024) menemukan bahwa tingkat efisiensi pengeluaran publik dapat berbeda antarpemerintah daerah dan tetap memerlukan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dengan demikian, Dinas Pertanian perlu mempertahankan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus meningkatkan pencapaian outcome pada komoditas yang masih berada di bawah target. Perbaikan perlu diarahkan pada kualitas program, pengendalian kegiatan, serta kemampuan mengantisipasi risiko produksi, kondisi lingkungan, penyakit hewan, dan faktor eksternal lainnya.

Perbandingan Kinerja Anggaran Berdasarkan *Value for Money*

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kinerja anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2025 berdasarkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perbandingan Kinerja Anggaran Tiga OPD Kabupaten Agam Tahun 2025 Berdasarkan *Value for Money*

Aspek	Dinas PUTR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pertanian
Ekonomi	Ekonomis (88,64%)	Cukup ekonomis (98,70%)	Ekonomis (88,79%)
Efisiensi	Empat sasaran tidak efisien	3 kegiatan efisien; 4 cukup efisien	Seluruh program/kegiatan efisien
Efektivitas	Didominasi kurang efektif; belum optimal	Banyak indikator efektif/sangat efektif, tetapi belum merata	Sebagian besar efektif/sangat efektif, tetapi belum merata
Kinerja <i>Value for Money</i>	Ekonomis, tetapi efisiensi dan efektivitas perlu ditingkatkan	Cukup ekonomis dengan efisiensi dan efektivitas relatif baik	Ekonomis dan efisien dengan efektivitas relatif baik

Sumber: LKjIP Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2025, diolah peneliti.

Berdasarkan Tabel 3, tidak terdapat OPD yang secara otomatis unggul pada seluruh aspek *Value for Money*. Dinas PUTR memiliki rasio ekonomi sebesar 88,64% dan tergolong ekonomis, tetapi empat sasaran yang dianalisis belum efisien serta efektivitasnya masih didominasi kategori kurang efektif. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki rasio ekonomi 98,70% atau cukup ekonomis, dengan tiga kegiatan efisien dan empat cukup efisien serta sejumlah indikator mampu mencapai bahkan melampaui target. Sementara itu, Dinas Pertanian memiliki rasio ekonomi 88,79%, seluruh program/kegiatan yang dianalisis tergolong efisien, dan sebagian besar indikator efektivitas berada pada kategori efektif atau sangat efektif, meskipun beberapa indikator masih belum mencapai target.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingginya penyerapan anggaran tidak selalu mencerminkan tingginya kinerja. Realisasi anggaran yang rendah dapat menunjukkan penghematan dan efisiensi apabila disertai pencapaian output yang tinggi, tetapi dapat pula mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program apabila output tidak mencapai target. Sebaliknya, realisasi anggaran yang mendekati 100% dapat menunjukkan kinerja yang baik apabila diikuti pencapaian sasaran yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan Suridiyanti et al. (2024) dan Prasetia et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pencapaian aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tidak selalu berjalan secara bersamaan. Hasil ini juga mendukung Lino et al. (2025), Finocchiaro Castro et al. (2025), serta Amusa dan Fadiran (2024) yang menunjukkan adanya variasi efisiensi pengeluaran publik antarorganisasi pemerintah dan daerah.

Temuan tersebut memperkuat pentingnya penilaian kinerja anggaran secara menyeluruh melalui pendekatan *Value for Money*. Usman et al. (2025) menegaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dinilai melalui aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara bersamaan. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran saja belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan pengelolaan sumber daya publik.

Hasil penelitian juga dapat dijelaskan melalui *Agency Theory*, yaitu masyarakat sebagai *principal* memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya publik. Perbedaan antara penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja menunjukkan pentingnya informasi mengenai tidak hanya jumlah anggaran yang direalisasikan, tetapi juga output dan hasil yang dihasilkan. Dalam konteks tersebut, penerapan *Value for Money* memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah karena memungkinkan penggunaan sumber daya publik dinilai berdasarkan penghematan, kemampuan menghasilkan output, dan pencapaian sasaran.

Dengan demikian, peningkatan kinerja anggaran Kabupaten Agam tidak cukup berorientasi pada peningkatan penyerapan anggaran. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran mampu menghasilkan output secara optimal dan mencapai sasaran pembangunan. Evaluasi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara bersamaan menjadi penting untuk mendorong pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran ketiga OPD Kabupaten Agam Tahun 2025 memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan pendekatan *Value for Money*. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tergolong ekonomis dengan rasio 88,64%, tetapi aspek efisiensi dan efektivitasnya masih belum optimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tergolong cukup ekonomis dengan rasio 99,44% serta menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang relatif baik, meskipun belum merata pada seluruh indikator. Sementara itu, Dinas Pertanian tergolong ekonomis dengan rasio 88,79%, seluruh program dan kegiatan yang dianalisis berada pada kategori efisien, serta sebagian besar indikator menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa tingkat penyerapan anggaran tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kinerja anggaran, sehingga penilaian perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

DAFTAR REFERENSI

- Amusa, H. A., & Fadiran, D. (2024). The Efficiency of Public Expenditures on Basic Services: The Case of South African Municipalities. *Outh African Journal of Economics*, 92(2), 183–213. <https://doi.org/10.1111/saje.12377>
- Azzahro, F., Erasandi, S., Kusumaningrum, N. D., & Maghfiroh, E. L. (2025). The Effect of Budget Efficiency on the Accountability of Local Government Agency Performance. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 10(2). <https://doi.org/10.33062/ajb.v10i02.157>
- Finocchiaro Castro, M., Guccio, C., Romeo, D., & Vidoli, F. (2025). How Does Institutional Quality Affect the Efficiency of Local Government? An Assessment of Italian Municipalities. *Economia Politica*, 42(2), 569–597. <https://doi.org/10.1007/s40888-025-00359-0>
- Harahap, H. F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 191–202. <https://doi.org/10.55043/ekonomipedia.v2i1.193>
- Hariatih, H., Ahmad, S., & Suriani, S. (2026). Evaluasi Kinerja Anggaran Belanja Daerah Melalui Pendekatan Value for Money: Studi Empiris pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima 2024. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 9(2), 263–275. <https://doi.org/10.33627/pk.v9i2.4583>
- Imantria, B., & Kurnia, A. S. (2024). Does Local Government Expenditure Lead to Human Development in Indonesia? *Economics Development Analysis Journal*, 13(2), 235–247. <https://doi.org/10.15294/edaj.v13i2.78979>
- Lino, C. N. Q., Apaza, R. R., & Blanco Espezua, M. del P. (2025). Efficiency of Public Spending at the Municipal Level: Evidence for the Peruvian Case 2017–2023. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1614884>
- Prasetia, D., Saladin, H., & Nurmala, N. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI). *ECo-Fin*, 6(2), 441–451. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1172>
- Prayoga, D. P. G., & Nirmalasari, H. (2025). Rancangan Perbaikan Kinerja Anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan Dengan Pendekatan Value for Money. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3). <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.963>
- Said, S. N. R., Arifuddin, Kusumawati, A., & Usman, A. (2025). Does the Concept of Value for Money Increase Budget Performance? *Public and Municipal Finance*, 14(1), 1–12. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(1\).2025.01](https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.01)
- Shiva, M., FitzGerald, C., Carter, E., & Airoidi, M. (2024). Beyond “make” or “buy”: Evaluating value-for-money in public service delivery. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 95(4), 1171–1196. <https://doi.org/10.1111/apce.12468>
- Stiglitz, J. E., Fitoussi, J.-P., & Durand, M. (2018). *Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social Performance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264307292-en>
- Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the Gap: Dynamics of Indonesia’s Public Expenditure Performance in Economically Lagging Districts. *Economic Analysis and Policy*, 85, 2299–2318. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014>

- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Suridiyanti, W. A., Haliah, H., & Nurleni, N. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Periode Tahun 2019-2021. *AKRUAL: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 17(1). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/akrual/article/view/28368>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2024). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Triyassari, A., & Sambharakreshna, Y. (2024). Value For Money dan Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7(2), 259–278. <https://doi.org/10.30596/jakk.v7i2.1972>
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020>
- Usman, U., Haeril, H., Salida, A., Taufiq, M., & Nur, Y. (2025). Evaluation of Local Government Financial Performance from the Value for Money Perspective. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 130–137. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1485>
- Zahra, A. I., & Ismanto, S. U. (2025). Pengukuran Kinerja Anggaran dengan Pendekatan Value for Money. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2). <https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.632>